

Sumpah Pemuda: "If We Hold on Together"

Bagian pertama
dari dua tulisan

Oleh : Suryo Adi Pramono

MAHASISWA Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta menyelenggarakan Ekaristi Kaum Muda dengan tema *If we hold together* (Jika kita bergandengan bersama), pada Sabtu 26 Oktober 2013, untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Hal ini menarik dan relevan menjadi "kalimat kunci" penanda fenomena kebangsaan kita sekarang. Fenomena kebangsaan ini perlu dikontraskan pula dengan semboyan: "Berbangsa satu, bangsa Indonesia; bertanah-air satu, tanah-air Indonesia; berbahasa satu, bahasa Indonesia".

Fenomena fragmentasi

Fenomena manakah itu? Pertama, sebagai bangsa, kita tidak jarang didera oleh peristiwa pertikaian (sosial, politik, ekonomi), kekerasan (sosial, keagamaan, linguistik), segregasi (sosial-ekonomi, sosial-keagamaan, sosial-budaya, etnisitas, dan geografis), diskriminasi (sosial-keagamaan, sosial-ekonomi dan etnisitas), dan jarak sosial (keagamaan, migran-penduduk asli, kelas ekonomi, status sosial, pen-

didikan).

Kedua, sebagai sesama anak bangsa yang bertanah air satu, kita menyaksikan bagaimana aneksasi tanah-air (dengan aneka sumber daya di dalamnya: tambang, perikanan, perkebunan, pertanian, tanah untuk domisili) terjadi oleh saudara yang kuat terhadap yang lemah. Aparat ketertiban, kepolisian dan militer pun tidak jarang menjadi instrumen kekerasan atau sekurangnya paksaan terhadap yang lemah. Pemerintah tidak "melindungi segenap bangsa Indonesia" karena berbagai pertimbangan praktis, bukan konstitusional.

Ketiga, sebagai putera-puteri pertiwi, kita acapkali didera oleh fenomena Bahasa Indonesia yang bukan lagi sebagai "instrumen mempersatu", sebagaimana era pergerakan kebangsaan (sebelum 1945) dan mempertahankan kemerdekaan (1945-1949), tetapi telah menjadi "instrumen pemecah" ketika ia



FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ATMAJAYA
YOGYAKARTA

bernuansa kekerasan, diskriminatif, pemaksaan, segregatif, dominatif, hegemonik dan distantif pada aneka kasus sosial-ekonomi, sosial-budaya, sosial-keagamaan dan sosial-politik.

Mengapa itu terjadi? Ini diduga oleh karena ketiadaan "genggaman tangan bersama" (*hold on together*). Umumnya, orang "menggenggam erat kepentingan diri, kelompok, golongan, kelas ekonomi dan status sosial" sehingga saudara sebangsa dengan sadar diinstrumentasikan untuk pemenuhan kepentingan sendiri. Kepentingan, meminjam gagasan swargi Romo Mangunwijaya, ditentukan oleh "titik pijak" (*stand point*). Kaum agamawan tertentu akan melihat persoalan dan perjuangan kepentingan semata-mata karena dunia keagamanya, demikian pula pebisnis dan pengusaha, penguasa, politisi, birokrat, geng anak muda, buruh dan petani. Marx benar: kon-

disi obyektif menentukan kesadaran subyektif.

Mengikuti gagasan Weber, kesadaran subyektif yang sarat dengan kepentingan itu (*self interests*) akan melahirkan "tindakan rasional bertujuan". Untuk mencapai tujuan, kesadaran menggunakan "rasionalitas instrumental": pikiran yang diabdikan sebagai alat pancapai tujuan diri. Berbeda dari para pemuda Generasi 1928 yang mengumandangkan Sumpah Pemuda dengan pijakan nilai (*values*), nir kepentingan diri, tetapi demi kepentingan bangsa — meskipun mereka berasal dari aneka etnis dan agama (Jong Ambon, Jong Jawa, Jong Sumatra, Jong Islamieten Bond, dan lain-lain); di mana mereka menjadikan "partikularitasnya" sebagai "modal" untuk bersatu-padu (*hold on together*) menjadi "pemuda Indonesia" untuk merengkuh kebangsaan yang lebih besar — kini para pewaris republik mengalami arus sebaliknya, dari "semangat kebangsaan" (Generasi 28 dan 45) lulur menjadi "semangat partikularistik" (Generasi 66 sampai 98). ***

Suryo Adi Pramono, Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UAJY.